

PROSPEK PARIWISATA KOTA BATAM DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Rahman Hasibuan

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan pariwisata dalam era globalisasi dan otonomi daerah tidak dapat lagi menggantungkan pada kebijakan dan peran pemerintah pusat saja, tetapi diperlukan peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pengembangan atraksi atau kombinasi atraksi budaya di daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah. Hal ini memerlukan kerjasama yang optimal dengan sektor swasta, lembaga/institusi pemerintah dan masyarakat.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri.

Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lain, sehingga koordinasi sangat penting.

Dua perubahan penting akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata, yaitu globalisasi dan lokalisasi atau desentralisasi dan otonomi daerah.

Otonomi daerah mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ini memerlukan reorientasi/perubahan peran dan fungsi pemerintah seperti yang dijelaskan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan-kebijakandasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana), kebijakan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia

Kota Batam merupakan salah satu bagian dari propinsi Riau yang memiliki potensi daerah yaitu posisi yang sangat strategis berada dilintasan kapal yang padat didunia yaitu selat malaka dan Singapura. Potensi lain adalah kedudukan batam sebagai Kawasan berikat dan kawasan industri yang berorientasi pada ekspor. Dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, sesuai prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah yang digariskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka Kota batam harus lebih mampu mencermati dan mengidentifikasi, menggali dan mengembangkan potensi yang belum seluruhnya tergali secara optimal. Termasuk dalam pengembangan pariwisata, ternyata yang berkembang hanya arus wisatawan dari penduduk Singapura ke batam dengan volume spending serta waktu tinggal hanya maksimum 2 (dua) hari.

Arah kebijakan Pariwisata Kota Batam

- Menyusun rencana Induk pengembangan objek wisata batam, terutama yang terkait dengan daerah hinterland dan mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada dan yang mempunyai keunggulan komperatif yang tinggi untuk meningkatkan nilai jual.
- Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sosial budaya kota batam untuk dapat dijadikan aset kepariwisataan yang baru, sehingga dapat semakin memperkaya objek wisata dan menciptakan keterkaitan antara usaha wisata dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan.
- Meningkatkan kegiatan pemasaran objek wisata melalui promosi wisata baik ke dalam dan luar negeri yang dilakukan secara terarah, terencana dan terpadu dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global yaitu IMT GT dan IMS-GT
- Meningkatkan dan mengembangkan mutu insan pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

- Mengendalikan dan mengawasi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan dengan memperkuat jati diri masyarakat sebagai manusia “kamil” yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berakhlak serta dengan memperkuat peran kelembagaan sosial lokal.
- Menganalisis potensi pariwisata daerah, serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah.
- Kebijakan pengembangan kombinasi atraksi budaya daerah diselaraskan dengan pembangunan regional secara keseluruhan serta perencanaan tata ruang propinsi.
- Pengembangan infrastruktur daerah yang menunjang pengembangan sektor pariwisata bekerjasama dengan pihak swasta. Infrastruktur daerah: fasilitas perhubungan (termasuk pelabuhan, bandara), sarana pendidikan bagi tenaga kerja industri pariwisata, infrastruktur dasar bagi pengembangan atraksi wisata potensial yang berlokasi di daerah terpencil.
- Promosi budaya dan wisata (yang menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi) bekerjasama dengan pihak swasta dan asosiasi-asosiasi pariwisata. Jika daerah mengalami keterbatasan dana, kegiatan promosi budaya dan wisata dapat memanfaatkan promosi melalui pasar wisata.
- Kebijakan pelestarian dan pemeliharaan sumber daya alam yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata daerah, seperti: pantai, sungai, hutan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- Kebijakan pengembangan peluang bisnis dan investasi asing pariwisata yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah, termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis seperti: pemberian ijin investasi di daerah.

- Kebijakan pengembangan usaha kecil-menengah pariwisata: mendorong kemitraan dengan usaha besar dalam negeri dan asing, mengadakan/memfasilitasi pengadaan fasilitas-fasilitas terpadu (pelatihan, penyediaan fasilitas keuangan, pemasaran, teknis, pengembangan sumber daya manusia).
- Kebijakan untuk mengakses sumber dana bagi calon investor, terutama calon investor menengah dan kecil dengan penekanan pada kelayakan usahanya. Memberikan informasi/penjelasan tentang berbagai skim kredit yang tersedia dan lembaga pendamping untuk dapat mengakses sumber dana tsb.
- Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya perhatian diberikan pada pengembangan sumber daya manusia di sektor-sektor/keahlian yang dibutuhkan/sesuai dengan prioritas dan kekuatan daerah. Termasuk ke dalam prioritas pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan wirausaha dalam bentuk pendidikan/pelatihan ketrampilan formal maupun informal.
- Kebijakan mendorong pariwisata mancanegara dan mendorong kerjasama antar kota, sister cities.

Untuk lebih memantapkan kualitas kualitas produk pariwisata Kota Batam menjadi lebih sempurna, berikut ini ada beberapa langkah akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam:

- Memberikan Jaminan kepastian atas apa yang diharapkan akan diperoleh wisatawan di tempat tujuan mereka baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Artinya disini, menyangkut juga kualitas pelayanan umum (public services); keamanan umum dalam perjalanan maupun pribadi; stabilitas ekonomi antara lain menyangkut harga, nilai tukar mata uang; stbilitas politik; sikap dan perlakuan masyarakat (ramah-tamah); kondisi lingkungan yang indah, tertib, bersih, dan tidak sarat polusi; suasana yang nyaman dan sebagainya. Kesemuanya sesuai dengan informasi awal yang diperoleh sebelum wisatawan meninggalkan tempat asalnya.

- Kecepatan pelayanan diperlukan sehubungan dengan kecenderungan meningkatnya arus wisatawan, sehingga tidak terjadi ekses-ekses negatif dikemudian hari. Seperti kongesti di pusat-pusat kegiatan antara lain bandara dan pelabuhan laut, pusat pertokoan, hotel, obyek wisata, dan sebagainya.
- Kecermatan pelayanan sebagai upaya memenuhi kriteria "error free" services, yang semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia regional/internasional.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi Perhatian Pemerintah Kota Batam

Permasalahan-permasalahan yang dapat berdampak pada sektor pariwisata, antara lain:

- Situasi politik dan keamanan pada umumnya, dan keamanan daerah pada khususnya.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak/sector terkait mengenai kebijakan dan target pariwisata.

Permasalahan yang dapat ditimbulkan sektor pariwisata, antara lain:

- Menimbulkan kerawanan dan masalah sosial.
- Menimbulkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah (dalam satu propinsi) sebagai akibat pengembangan akses dan pembangunan infrastruktur yang semata-mata erdasarkan potensi wisata yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu.

Dalam banyak kasus, pengembangan sektor pariwisata misalnya: pengembangan kawasan wisata dapat memarjinalkan penduduk lokal, merusak kebudayaan lokal dan menimbulkan kerusakan lingkungan

Prinsip Pengembangan Sektor Pariwisata

- Pariwisata melibatkan multisektor (perhubungan, akomodasi, obyek wisata, travel agent, dsb) yang pengembangannya tidak hanya tergantung pada Kantor Menteri Negara Pariwisata dan pemerintah daerah.
- Mengembangkan sektor pariwisata dengan mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa.
- Pembangunan pariwisata yang inklusif yang menyertakan potensi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi dicanangkan pada 1 Januari 2001, tampaknya tidak berjalan semulus ketika direncanakan. Sejumlah kendala yang bakal berujung ke kegagalan, mulai bermunculan. Kendala yang sudah pasti adalah keterbatasan sumber dana atau pendapatan asli daerah (PAD), terutama bagi daerah yang miskin sumber daya alam, atau daerah yang mendapat subsidi besar dari pemerintah pusat.

Di antara sejumlah sumber pendapatan asli daerah, sektor pariwisata agaknya bakal berperan besar. Bagaimana memanfaatkan potensi pariwisata, khususnya kawasan wisata bahari? Secara khusus, untuk daerah-daerah yang bertetangga, penggalangan kegiatan terpadu sektor pariwisata akan memberikan manfaat besar dalam kerangka pengembangan otonomi daerah.

Indonesia juga perlu melakukan pembaharuan produk wisata yang ditawarkan, mengingat produk wisata di tanah air saat ini tengah mengalami penurunan kualitas. "Misalnya, dengan memberikan nilai plus kepada obyek-obyek dan atraksi wisata yang ditampilkan, sehingga para wisatawan baik domestik maupun mancanegara mendapatkan produk wisata 'baru' yang lebih unik dan menarik, kendati obyek dan atraksi wisata yang ditawarkan adalah produk lama. Hal penting yang perlu dibenahi dalam mendukung promosi pariwisata Indonesia ke mancanegara adalah masalah keamanan dan kenyamanan yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan sehingga membuat enggan turis untuk datang dan berlibur ke Indonesia.

Konsistensi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, merupakan prasyarat mutlak untuk mendorong kegiatan promosi pariwisata nasional ke luar negeri. Percuma saja kita berpromosi bahwa Indonesia aman, namun pada kenyataannya masih ada daerah yang bergejolak.

Promosi disertai informasi aktual dan akurat mengenai situasi dan kondisi Indonesia sebenarnya secara kontinu, akan membantu memulihkan citra Indonesia di mata dunia, selain industri pariwisata Indonesia akan tetap eksis dan mampu bersaing dengan negara tujuan wisata lainnya. Tentang upaya menggalang dana untuk keperluan promosi, dapat dilakukan dengan menarik pungutan sebesar dua persen dari pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata. Misalnya, pemerintah tahun ini menargetkan pendapatan sektor pariwisata sebesar empat miliar rupiah, diambil dua persen berarti didapat 80 juta rupiah untuk kepentingan promosi. Dengan begitu, kalangan pelaku industri pariwisata akan terpacu untuk meningkatkan kegiatan promosi dan pengembangan produk wisatanya.

Pariwisata alam memiliki 4 (empat) ciri-ciri utama yang perlu mendapatkan perhatian, yakni :

Pertama, obyek-obyek yang akan dikembangkan adalah obyek-obyek yang ada di alam (hutan, kebun, pantai/laut,) dan budaya yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya.

Kedua, dalam pemanfaatannya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat kecil namun sebaliknya dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau obyeknya itu sendiri, sesuai dengan aspek konservasi.

Ketiga, masyarakat di sekitar kawasan atau obyek dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut karena mereka ikut terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Keempat, adanya unsur pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta melestarikan obyek. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka pembangunan pariwisata alam harus diarahkan kepada pembangunan pariwisata alam yang berbasiskan kepada masyarakat (*community based-tourism*), agar masyarakat di sekitar kawasan dapat merasakan manfaat secara langsung dari kawasan tersebut.

Di sisi lain, alternatif strategis pembangunan kehutanan di masa mendatang paling sedikit ada empat hal yang dapat dijadikan alasan mengapa *ecotourism* digunakan sebagai salah satu pemulih citra kehutanan, yakni:

1. *Ecotourism* dipahami sebagai sebagai industri yang mendukung upaya konservasi, keindahan, keaslian, kepekaan atraksi yang dimiliki Indonesia dan sekaligus dapat dikembangkan sebagai *pull factor* dan *push factor* yang menggerakkan konsumen (pasar) kearah produk, bukan sebaliknya. Namun, apabila tidak mampu lagi menggerakkan konsumen industri tersebut akan terhenti.
2. *Ecotourism* dapat dikembangkan sebagai wahana pendidikan dan perilaku bangsa untuk lebih menghargai sumber daya alam, mencerminkan betapa sumber daya tersebut sangat berharga. Melalui kegiatan-kegiatan wisata yang menyenangkan di alam, bangsa dapat dididik untuk lebih jauh mengenal peran sumber daya alam dalam menjaga keberlanjutan bumi ini beserta isinya, sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berperan dan berfungsi sebagai sumber aktifitas masyarakat baik ekonomi, sosial maupun budaya.
3. *Ecotourism* dapat dijadikan alat pemersatu bangsa karena ketergantungan masyarakat kepada sumber daya alam hutan masih sangat tinggi.
4. *Ecotourism* diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi negara.

Berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk memacu perkembangan kegiatan pariwisata alam, yakni dengan adanya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dengan PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Swasta, BUMN, BUMD, Koperasi dan Perorangan untuk mengembangkan usaha pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam seperti di zona pemanfaatan taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya dengan mengikutsertakan masyarakat di sekitarnya.

Namun demikian, ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan lagi. Salah satu diantaranya adalah prosedur untuk memperoleh Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) khususnya bagi investor menengah ke bawah dan perorangan masih dirasakan sangat panjang dan berbelit-belit. Demikian pula keterlibatan masyarakat setempat perlu lebih diperjelas lagi agar mereka bisa memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjadi pelaku yang sebenarnya dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam.

Selain itu, ijin pengusahaan pariwisata alam yang ada juga perlu dikelompokkan lagi menurut jenis kegiatan usaha, jangka waktu pengusahaan, dan kriteria pengusaha yang akan menanamkan modalnya, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya.

Pengembangan Pariwisata Bahari

Konsepsi pengembangan wisata bahari Indonesia mempunyai potensi sebagai daerah tujuan wisata terbesar di dunia. Untuk lebih mengembangkan pariwisata bahari seperti *surfing*, *diving*, *snorkling*, *fishing*, dan sebagainya tersebut, direncanakan akan dibangun lima buah port of entry, yaitu di Batam, Sabang, Jakarta, Biak, dan Bena. Selain itu, hendaknya aturan yang ada dibuat lebih mudah dan tidak dilakukan pemeriksaan di setiap pelabuhan.

Untuk menunjang rencana tersebut (bersamaan dengan telah diberlakukannya otonomi daerah), Pemda bisa membuat aturan bersama tentang *event development* serta menyiapkan kawasan-kawasan wisata bahari.

Pada dasarnya dunia internasional telah mulai mengenal kualitas wisata bahari yang terdapat di nusantara. Misalnya saja seperti Mentawai yang terkenal dengan gelombang untuk *surfer*, bahkan sampai mengeluarkan aturan kepemilikan gelombang karena keunikannya.

Namun sebaliknya, terdapat juga daerah tujuan wisata yang memiliki potensi besar, tetapi promosinya tidak dilakukan secara gencar. Misalnya, objek wisata Pulau Moyo di Sumbawa Barat. Di lokasi tersebut terdapat sebuah pulau yang menampilkan keindahan tropikal Indonesia. Objek wisata tersebut sangat digemari, sehingga untuk datang ke sana harus melakukan pemesanan tempat sampai dengan enam bulan sebelumnya. Suasana yang dihadirkan oleh objek wisata itu sangat alami, fasilitas istirahat hanya menggunakan tenda-tenda alami serta tidak terdapat saluran telepon. Biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan objek wisata ini adalah berupa kapal pesiar sebagai sarana transportasi dari Pulau Sumbawa/Pulau Lombok dan biaya untuk pemasaran. Untuk pemasaran bisa dilakukan kerja sama dengan sektor tertier dari luar negeri.

Contoh lain dari sebuah pulau tropis yang sangat indah terletak di Sangir Talaud. Pulau tersebut hanya ditempati oleh sekitar 200 kepala keluarga. Penduduk hanya menghuni sebagian dari pulau tersebut, sedangkan bagian lainnya dapat dijadikan sebagai objek wisata alami. Modal untuk pengembangan pulau tersebut di antaranya berupa konstruksi, transportasi dan keamanan seperti patroli dan sebagainya. Konsepsi pengembangan tidak menekankan agar kepala keluarga memiliki saham mayoritas.

5. Penutup

Kebijakan pengembangan pariwisata dalam era globalisasi dan otonomi daerah tidak dapat lagi menggantungkan pada kebijakan dan peran pemerintah pusat saja, tetapi

diperlukan peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pengembangan atraksi atau kombinasi atraksi budaya di daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah. Hal ini memerlukan kerjasama yang optimal dengan sektor swasta, lembaga/institusi pemerintah dan masyarakat.